

DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN SIDOARJO

(Studi Pada Relokasi PKL Alun-alun Ke GOR Delta Sidoarjo)

Riza Irma Arfiani

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
rizairma68@gmail.com

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Alun-alun Sidoarjo digunakan sebagai pusat keramaian dan kegiatan ekonomi masyarakat dengan banyaknya para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang banyak berjualan didalamnya. Keberadaan PKL menggeser fungsi Alun-alun sebagai ruang publik yang nyaman dan bersih. Guna mengembalikan fungsi Alun-alun sebagai paru-paru kota dan ruang terbuka yang hijau, Pemerintah Sidoarjo merelokasi para PKL dari Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo. Pemerintah Sidoarjo menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Sidoarjo karena menganggap bahwa mereka sudah menyalahi aturan yaitu pada Peraturan Daerah No.5 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini dilihat dari 4 unit sosial yang terkena dampak kebijakan yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz, yaitu: Individual, Organisasi, Masyarakat, Lembaga dan Sistem Sosial. Pada dampak individual terutama sosial, setelah direlokasi ke GOR Delta terjadi persaingan antar pedagang semakin ketat. Selain persaingan antar sesama pedagang asli juga adanya persaingan antara pedagang asli dengan pedagang musiman yang tiap hari Minggu pagi datang ke GOR Delta. Pada dampak organisasional, kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) mengakibatkan dampak organisasional atau kelompok terhadap para pedagang. Adanya kebijakan relokasi ini dapat dirasakan dampaknya secara langsung oleh kelompok "Paguyuban Pedagang Kaki (PKL) Bersatu" yang berjualan di GOR Delta Sidoarjo. Sedangkan dampak tidak langsung dari kebijakan relokasi adalah adanya semangat kerja dan gotong royong antar kelompok Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Bersatu. Pada dampak masyarakat, dengan adanya kebijakan relokasi tersebut membuat masyarakat pengguna (*user*) merasa senang karena masih bisa memenuhi kebutuhannya. Serta ada juga masyarakat sekitar GOR Delta yang merasa terganggu dengan adanya relokasi tersebut, karena menurut mereka GOR Delta menjadi tampak semrawut oleh PKL pindahan dari Alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Pada dampak lembaga dan sistem sosial, adanya kebijakan ini membuat GOR Delta tampak tidak teratur. Banyak hal yang harus dibenahi yaitu masalah penerangan dan lampu. Penerangan di area Gelora Delta menjadi suram, yang paling tampak disisi barat. Saat malam hari di sisi barat banyak berdiri warung yang terkesan remang-remang. Selain membuat GOR Delta tampak suram karena minimnya penerangan juga membuat pemandangan menjadi kumuh, pedagang membuat taman mati. Dari kesimpulan diatas, terdapat saran terkait penelitian Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima: Perlu dilakukannya penataan ulang persoalan Pedagang Kaki lima (PKL) dengan cara mencari lahan baru atau membuat sentra-sentra khusus Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di GOR Delta.

Kata Kunci: Dampak, Kebijakan, Relokasi.

Abstract

Sidoarjo square used as the center of crowded and economic activities of the community with many street vendors which sells a lot in it. The existence of street vendors shift the function of the square as a comfortable and clean public space. To restore the function of the square as the lungs of the city and green open space, the government of Sidoarjo relocated the street vendor from the Sidoarjo square to the sports arena Sidoarjo. The government of Sidoarjo curb the street vendors in Sidoarjo square because the street vendors has violated the rules contained in Sidoarjo's Regulation No. 5 of 2007 about the administration of peace and public order. The research aims to describe the impact of relocation policy of street vendors from the Sidoarjo square to the sports arena Sidoarjo. The research us qualitative methods with type research type is descriptive. The focus of the research is seen from 4 social units which affected by the policy whicity was forward by Finsterbusch and Motz, that is: Individual, Organizational, Community, Institution and Social System. On the individual impact, especially social, after being relocated to the

sports arena there is intense competition among traders. In addition to competition among fellow traders, there is also competition between the original traders with seasonal traders who every Sunday morning come to the sports arena Sidoarjo. In the organizational impact, the relocation policy of street vendors results in organizational or group impacts on traders. The existence of this relocation policy can be felt its impact directly by the group of "Union Traders Association United" which sells in sports arena Sidoarjo. While the indirect impact of relocation policy is the existence of morale and mutual cooperation between groups of Union Traders Association United. On the impact of society, with the relocation policy makes the user community (user) feel happy because it can still meet their needs. And there are also people around the sports arena who feel disturbed by the relocation, because according to them sports arena becomes looks chaotic by street vendors move from Sidoarjo square. On the impact of institutions and social systems, the existence of this policy makes sports arena seem irregular. Many things that must be addressed are lighting and lighting problems. Illumination in the sports arena area became bleak, most visible on the western side. At night on the west side there are many stalls that seem dimly lit. In addition to making the sports arena Sidoarjo look bleak because of the lack of lighting also makes the scene a slum, traders create a dead garden. From the above conclusions, there are suggestions related to the Impact of Five-Star Traffickers Relocation Policy: It is necessary to rearrange the problem of street vendors by finding new land or to create special centers of street vendors in the sports arena Sidoarjo.

Keywords: Impact, Policy, Relocation.

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki lima (PKL) sudah menjadi bagian dari kehidupan di Kabupaten. Hampir setiap kabupaten memiliki masalah tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Permasalahan yang dialami hampir sama yaitu masalah ketertiban, kemacetan, kebersihan, dan tata ruang. Banyak sekali usaha pemerintah setempat dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL di Kabupaten Sidoarjo lebih terpusat pada daerah di Kecamatan Sidoarjo, khususnya kawasan Alun-alun.

Penyebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo mulai menunjukkan gejala kurang terkendali, yang berdampak beralihnya fungsi suatu kawasan dalam hal ini adalah kawasan Alun-alun. Kawasan Alun-alun kota yang seharusnya menjadi pusat pemerintahan dan merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) beralih fungsi menjadi pusat perekonomian menengah ke bawah karena kawasan Alun-alun tumbuh pesat menjadi ajang transaksi ideal bukan hanya bagi PKL yang terus meningkat tetapi juga munculnya gejala sosial lainnya seperti premanisme, gelandangan dan lain sebagainya. (Sumber : Data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melihat keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkungan Alun-alun kota ini sangat mendesak untuk segera ditangani, paling tidak karena tiga alasan. Pertama karena PKL di lingkungan alun-alun kota ini terletak tepat di depan Kantor Bupati yang semestinya menjadi sentral pemerintahan dan menjadi kebanggaan warga Kabupaten Sidoarjo. Kedua dengan membiarkan perkembangan PKL yang terus bertambah di khawatirkan hal itu akan dapat menimbulkan preseden buruk bagi upaya penataan kota

secara keseluruhan. Ketiga keberadaan PKL di lingkungan alun-alun kota sudah melewati banyak jumlahnya, melewati ambang batas toleransi kemampuan lokasi ini untuk menampungnya.

Dengan melihat kondisi tersebut, segala upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilakukan diantaranya adalah upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Alun-alun menuju GOR Delta Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima untuk menciptakan lingkungan Alun-alun yang tertib dan rapi. Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo direlokasi ke GOR Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengambil kebijakan untuk permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut dengan melihat pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berbunyi : "Larangan setiap orang melakukan kegiatan/usaha apapun di trotoar jalan, bahu jalan, dan taman".

Sebelum pelaksanaan relokasi tentunya dilakukan berbagai macam persiapan terlebih dahulu. Langkah pertama adalah rapat koordinasi tim untuk relokasi dibentuk oleh masing-masing SKPD yang terlibat sesuai dengan kewenangan serta peran SKPD dalam proses relokasi. Selanjutnya dilakukan pendekatan atau sosialisasi dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Sosialisasi tersebut melalui musyawarah dengan pedagang sehingga dari musyawarah tersebut diungkapkan berbagai pendapat maupun keluhan dari pedagang, misalnya bagaimana seandainya pemerintah melakukan relokasi, apa keinginan-keinginan

dari pedagang. Dan apabila relokasi itu benar terjadi, apa tuntutan-tuntutan dari pedagang. Setelah dilakukannya sosialisasi dan mendapat persetujuan dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) akhirnya dilakukannya pemindahan atau relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke Gor Delta Kabupaten Sidoarjo. (Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo)

Dilihat dari uraian di atas, dapat dimengerti bahwa tujuan dari kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah dalam rangka ketertiban dan penataan kota khususnya di Alun-alun. Pemerintah ingin membangun taman dan sarana prasarana olahraga di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo untuk menciptakan alun-alun yang indah, rapi, dan asri. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam menciptakan tata ruang kota yang tertib dan teratur dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin tertatanya lingkungan Kabupaten Sidoarjo dan mendapatkan penghargaan Kota Adipura Kirana pada tahun lalu.

Penelitian ini bermaksud mengkaji dampak dari kebijakan relokasi. Peneliti menggunakan teori dari Finsterbusch dan Motz (Wibawa, 1994:54-60) unit-unit pedampak karena penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dampak dari kebijakan relokasi terhadap individu, kelompok maupun masyarakat. Unit-unit pedampak terbagi menjadi empat, yaitu: Pertama Dampak Individual, yang menyentuh pada aspek-aspek psikologis, ekonomi dan sosial. Kedua Dampak Organisasional, suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak langsung terhadap organisasi maupun kelompok, baik secara langsung atau tidak langsung yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan kelompok/organisasi. Ketiga Dampak Terhadap Masyarakat, dampak tersebut dapat menunjuk pada sejauh mana suatu kebijakan mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. Keempat Dampak Terhadap Lembaga dan Sistem Sosial, dengan adanya sebuah kebijakan atau program yang dimaksud tidak hanya akan mengubah atau mempengaruhi lembaga-lembaga, melainkan kebijakan tersebut juga kan mempengaruhi berbagai dimensi sosial yang lain.

Dengan melihat latar belakang maka dirumuskan masalah bagaimana dampak kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR Delta Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana dampak kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR Delta Kabupaten Sidoarjo.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, Fokus dalam penelitian ini yaitu melihat dampak pada unit-unit pedampak seperti yang dikemukakan oleh Wibawa (1994: 54-60) yaitu Dampak Individual, Dampak Organisasional, Dampak Terhadap Masyarakat, serta Dampak Terhadap Lembaga Dan Sistem Sosial. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo. Adapun teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan menurut Miles Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2015:91) yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Sajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung akan disajikan dalam sub bab ini sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana dampak kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR Delta Kabupaten Sidoarjo, maka akan dideskripsikan berdasarkan dampak apa saja yang terjadi dari kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR Delta Kabupaten Sidoarjo dilihat dari teori Finsterbusch dan Motz (Wibawa, 1994:54-60). Pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR Delta sendiri antara lain:

- a) Kepala Seksi Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Sidoarjo
- b) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo
- c) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) GOR Delta Kabupaten Sidoarjo
- d) Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) di GOR Delta Kabupaten Sidoarjo
- e) Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang direlokasi ke GOR Delta Kabupaten Sidoarjo.
- f) Masyarakat sekitar GOR Delta Kabupaten Sidoarjo.

Dampak kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR Delta Kabupaten Sidoarjo dapat diketahui melalui teori unit-unit pedampak menurut Finsterbusch dan Motz (Wibawa, 1994:54-60) sebagai berikut:

Dampak terhadap individu dapat menyentuh aspek-aspek psikologis, ekonomi dan sosial. Kebijakan relokasi telah memberikan dampak aspek psikologis, ekonomi, dan sosial. Pada aspek psikologis, relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo memberikan dampak psikologis bagi para pedagang. Ketika masih berada di Alun-alun pedagang merasa kurang nyaman dengan kondisi Alun-alun yang kumuh dan semrawut namun pedagang senang berada di Alun-alun karena sudah menyatu dengan diri pedagang yang telah puluhan tahun berjualan di Alun-alun Sidoarjo. Peraturan di Alun-alun juga tidak seketat di GOR Delta. Misalnya, peraturan jam buka. Pada aspek ekonomi, GOR Delta lebih nyaman bila dibanding dengan Alun-alun dulu, tempat yang aman dan nyaman tersebut tentunya membawa rasa tenang dan aman bagi pedagang dalam melakukan kegiatan perdagangannya. Sebab dengan kondisi GOR Delta yang lebih baik, maka akan berdampak pula pada perekonomian pedagang. Komponen terpenting dalam sistem perdagangan bagi para pedagang sendiri tidak lain adalah pendapatan, karena apapun dan bagaimanapun bentuk perdagangan yang mereka lakukan, pasti tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh pendapatan dalam jumlah tertentu. Begitu pula dengan para pedagang yang direlokasi. Bagi pedagang tersebut, harapan utama dari adanya relokasi adalah semakin meningkatnya pendapatan yang mereka peroleh di tempat yang baru atau bahkan bisa melebihi dibanding ketika berdagang di Alun-alun. Pada aspek sosial, setelah direlokasi ke GOR Delta terjadi persaingan antar pedagang semakin ketat, pedagang-pedagang baru yang mempunyai modal banyak bisa menjual bebas. Selain persaingan antar sesama pedagang asli juga adanya persaingan antara pedagang asli dengan pedagang musiman yang tiap hari Minggu pagi datang ke GOR Delta. Lama kelamaan terjadi persaingan antara pedagang asli dengan pedagang musiman yang tiap minggu pagi datang karena justru pedagang luar/pedagang musiman yang diserbu oleh pengunjung dan pedagang asli merasa dirugikan.

Dampak terhadap organisasional, suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak langsung terhadap organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo juga mengakibatkan dampak organisasional atau kelompok terhadap para pedagang. Adanya kebijakan relokasi ini dapat dirasakan dampaknya secara langsung oleh kelompok "Paguyuban Pedagang Kaki (PKL) Bersatu" yang berjualan di GOR Delta Sidoarjo. Paguyuban PKL Bersatu ini di anggotai oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terkena dampak relokasi, mereka mengumpulkan dana dengan cara membuat kas. Dengan cara penarikan Rp. 2.000

setiap hari sabtu. Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Bersatu ini disusun guna memberikan dana untuk anggota PKL yang sedang sakit atau untuk keperluan agustusan berupa mengadakan acara lomba antar para pedagang dan untuk memperindah GOR Delta dengan cara mengecat jalan-jalan di kawasan GOR Delta Sidoarjo. Adanya kas Paguyuban PKL Bersatu ini untuk mensejahterakan anggotanya. Mereka merasa senang dengan dibentuknya Paguyuban PKL Bersatu. Tapi mereka menyayangkan tidak adanya koperasi untuk para PKL GOR Delta. Sedangkan dampak tidak langsung dari kebijakan relokasi adalah adanya semangat kerja dan gotong royong antar kelompok Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Bersatu. Hendaklah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo jeli terhadap apa yang dirasakan oleh pedagang, sehingga bisa membantu pedagang untuk lebih mengembangkan rasa gotong-royong antar pedagang di GOR Delta Sidoarjo.

Dampak terhadap masyarakat, masyarakat bukanlah unit sosial yang goal-oriented seperti organisasi. Dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat menunjuk sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo juga mengakibatkan dampak terhadap masyarakat. Masyarakat merasakan adanya dampak dari kebijakan relokasi. Masyarakat pengguna (user) yang merasa senang dengan adanya kebijakan relokasi tersebut. Tapi masyarakat juga mengeluhkan karena kurangnya fasilitas berupa gazebo untuk para pengunjung. Serta ada juga masyarakat sekitar GOR Delta yang merasa terganggu dengan adanya relokasi tersebut. Hendaklah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan, karena dapat dimengerti dengan adanya relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo untuk menciptakan suasana Alun-alun kota yang indah, bersih, dan tertib. Tidak melihat pada imbas yang terjadi di GOR Delta, GOR yang menjadi salah satu *icon* kota menjadi tampak semrawut oleh PKL pindahan dari Alun-alun Kabupaten Sidoarjo.

Dampak terhadap lembaga dan sistem sosial, sebuah kebijakan yang dimaksud tidak hanya dapat mengubah atau mempengaruhi lembaga-lembaga dan kelompok sasaran, melainkan kebijakan tersebut akan mempengaruhi berbagai dimensi sosial yang lain. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo memberikan dampak terhadap lembaga sosial. Lembaga sosial yang dimaksud adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) GOR Delta Sidoarjo. Dengan adanya kebijakan relokasi dari Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo mengakibatkan GOR Delta tampak tidak teratur. Banyak hal yang harus dibenahi yaitu masalah penerangan dan lampu. Penerangan di area Gelora Delta menjadi suram, yang paling tampak disisi barat. Saat

malam hari di sisi barat banyak berdiri warung yang terkesan remang-remang. Selain membuat GOR Delta tampak suram karena minimnya penerangan juga membuat pemandangan menjadi kumuh, pedagang membuat taman mati.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukannya penataan ulang persoalan Pedagang Kaki lima (PKL) dengan cara mencari lahan baru atau membuat sentra-sentra khusus Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di GOR Delta. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi GOR Delta sebagai tempat Olahraga.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR Delta Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori dari Finsterbusch dan Motz (Wibawa, 1994:54-60) unit-unit pedampak, maka dapat disimpulkan menurut masing-masing dampak sebagai berikut:

Pada dampak individual, kebijakan relokasi telah memberikan dampak aspek psikologi, ekonomi, dan sosial. Terutama aspek sosial, setelah direlokasi ke GOR Delta terjadi persaingan antar pedagang semakin ketat. Selain persaingan antar sesama pedagang asli juga adanya persaingan antara pedagang asli dengan pedagang musiman yang tiap hari Minggu pagi datang ke GOR Delta.

Pada dampak organisasional, para anggota kelompok Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Bersatu ini para anggotanya merasa senang dengan adanya kas paguyuban. Sebab uangnya dapat disumbangkan untuk menjenguk pedagang yang sedang sakit, juga untuk kepentingan agustusan setiap tahunnya, namun mereka menyayangkan tidak adanya koperasi untuk para PKL GOR Delta.

Pada dampak masyarakat, dampak dari kebijakan relokasi bagi masyarakat adalah mereka merasa senang dengan adanya relokasi tersebut. Dikarenakan masyarakat dapat dengan mudah berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-harinya, namun masyarakat juga mengeluhkan karena kurangnya fasilitas berupa gazebo untuk para pengunjung. Selain merasa senang, ada juga masyarakat sekitar GOR Delta yang merasa terganggu dengan adanya relokasi tersebut.

Pada dampak Lembaga dan Sistem Sosial, dengan adanya kebijakan relokasi dari Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo mengakibatkan GOR Delta tampak tidak teratur. Banyak hal yang harus dibenahi yaitu masalah penerangan dan lampu. Penerangan di area Gelora Delta menjadi suram, yang paling tampak disisi barat. Saat malam hari di sisi barat banyak berdiri warung yang terkesan remang-remang.

Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti akan memberikan saran terkait penelitian Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR Delta Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Hendaklah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lebih meningkatkan fasilitas yang ada di GOR Delta, seperti tersedianya gazebo. Supaya lebih menarik minat pengunjung dan pembeli, sehingga bisa membantu pedagang untuk dapat bangkit dan mengembangkan perdagangan di GOR Delta Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo seharusnya mendirikan koperasi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di GOR Delta, sehingga bisa membantu pedagang untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo semestinya lebih bijaksana dalam mempertimbangkan sebelum mengambil ketetapan, karena dapat dimengerti dengan adanya relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo untuk menciptakan suasana Alun-alun kota yang indah, bersih, dan tertib. Tidak melihat pada imbas yang terjadi di GOR Delta, GOR yang menjadi salah satu *icon* kota menjadi tampak semrawut oleh PKL pindahan dari Alun-alun Kabupaten Sidoarjo.
4. Perlu dilakukannya penataan ulang persoalan Pedagang Kaki lima (PKL) dengan cara mencari lahan baru atau membuat sentra-sentra khusus Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di GOR Delta. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi GOR Delta sebagai tempat Olahraga.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Dunn, William. 1998. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harbani Pasolong. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hatta. (2015). *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*. Volume 3, Nomor 1: 1-116
- Inu Kencana Syafie. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nidia Fitriani. 2009. *Evaluasi Program Relokasi dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta*. Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM.

Rachbini, Didik. J dan Abdul Hamid. 2004. *Ekonomi Informal Perkotaan*. LP3ES: Jakarta

Samodra Wibawa, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Subarsono, AG, 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. *Metode Peneletian Administrasi*. Bandung: CV. ALFABETA

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA.

Rujukan dari Peraturan:

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2007
Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Di dalam penulisan jurnal ini, peneliti menyadari bahwa selesainya jurnal tidak lepas dari peran serta dan dukungan yang diberikan oleh beberapa pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih dan apresiasi sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang membantu dan mendukung selesainya jurnal yang peneliti tulis. Semoga amal baik semua pihak yang mendukung selesainya jurnal ini mendapat balasan dari Allah SWT. Terakhir semoga jurnal ini bisa memberikan manfaat untuk kemajuan penelitian selanjutnya, peneliti juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.